

BAB V

KESIMPULAN

Jepang merupakan sebuah negara di kawasan Asia Timur yang pada saat ini tengah menjadi kilat pembangunan bagi negara-negara berkembang. Dimana Jepang merupakan negara industri paling maju di kawasan Asia. Kemajuan industri pada suatu negara tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya energi yang memadai. Dilihat dari sisi kelimpahan sumber daya alam, Jepang termasuk negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Dengan segala keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki, Jepang melakukan terobosan inovasi dengan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya sehingga menjadi negara yang mampu mencukupi kebutuhan energinya.

Keberhasilan Jepang dalam membangun negaranya adalah karena usaha bangsa Jepang sendiri. Jika kita melihat keberhasilan yang dimiliki Jepang itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu keajaiban. Jepang yang pada abad ke-19 merupakan negara yang masih terbelakang, kini menjadi sebuah negara industri yang produknya hampir seluruhnya mengalir ke seluruh kawasan di dunia. Keberhasilan Jepang ini didukung oleh sumber daya yang ada, yakni sumber daya manusianya.

Ketika manusia modern meletakkan parameter pertumbuhan ekonomi dalam paradigma developmentalisme untuk mengukur standar kualitas hidup dan kelayakan hidup, sejak itulah sebetulnya lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat telah dikorbankan dan mengalami degradasi yang sangat hebat. Pada sisi lingkungan hidup dan sumber daya alam degradasi itu telah menghadirkan krisis lingkungan hidup yang

berkepanjangan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang tajam dari waktu ke waktu. Ini adalah bayaran yang paling mahal dari kehidupan

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditandai dengan tepat. Isu ini memberikan banyak ancaman bagi kehidupan manusia karena pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan laporan IPCC, dampak perubahan iklim tidak hanya dalam konteks lingkungan semata, tetapi juga berkembang dalam aspek lainnya. Sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemanasan global sebagai implikasi lain dari perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas modern yang kompleks, melibatkan dunia secara keseluruhan, kondisi ini juga berhubungan dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ledakan penduduk. Dengan demikian, penanganannya tentu tidaklah mudah, dan mengabaikan isu ini juga berimplikasi sangat buruk atas keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini.

Jepang sebagai negara yang pendapatan terbesarnya melalui sektor industri ini selalu mencoba untuk terus mengembangkan kemajuan teknologinya untuk kemajuan industri. Namun dibalik kemajuan yang dibuat Jepang tersebut, di lain sisi Jepang pun harus memperhatikan dampak-dampak yang terjadi akibat pengembangan industri negaranya, salah satu dampak terbesarnya yakni masalah lingkungan. Industrialisasi merupakan faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Jepang. Pertumbuhan ekonomi dimasyarakat Jepang pasca perang dan juga disertai dengan kerusakan lingkungan, menunjukkan bahwa Jepang memiliki catatan terburuk mengenai kerusakan lingkungan di antara negara-negara maju. Hal tersebut dilakukan oleh Jepang tidak lain untuk meningkatkan perekonomian Jepang.

Sehingga Jepang berupaya ikut serta dalam penanganan isu perubahan iklim global yakni Protokol Kyoto yang dibentuk oleh badan PBB yang menangani masalah lingkungan (UNFCCC). Dimana aturan-aturan yang ada di Protokol Kyoto mewajibkan Jepang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 6% dalam periode 2007-2012, dan bagi Jepang aturan tersebut menjadi beban berat yang dapat mempengaruhi kebijakan Jepang, dan dalam pelaksanaannya tersebut, upaya Jepang dalam Protokol Kyoto malah terlihat bimbang atau dilema.

Beberapa hal yang membuat Jepang yang merupakan negara Industri dilema dalam penanganan isu perubahan iklim global (Protokol Kyoto), diantaranya sebagai berikut:

1. **Adanya Kelompok Penekan (*Pressure Group*)**, yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Jepang dalam berkomitmen pada Protokol Kyoto. Dalam hal ini, jika disangkutpautkan hubungan antara dilema yang terjadi oleh Jepang dalam penanganan isu perubahan iklim dengan sistem politik yang Jepang gunakan, dandilema yang Jepang alami pada saat pengambilan keputusan untuk berkomitmen pada Protokol Kyoto adalah karena adanya tekanan-tekanan dalam negeri yang membuat Jepang untuk melindungi industri-industrinya dari pengurangan emisi dimana hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Jepang sendiri, akan tetapi keikutsertaan Jepang dalam Protokol Kyoto juga penting bagi Jepang karena dengan ikut berkomitmen Jepang dapat mempererat hubungan diplomatis dengan negara-negara maju maupun berkembang yang juga ikut berpartisipasi dalam Protokol Kyoto, sehingga Jepang pun bisa membuka lebar sayapnya dalam pasar internasional.

2. **Kebijakan Politik Hijau (*Green Politic*) Jepang**, menurut para ahli politik hijau adalah mempelajari relasi yang kompleks antara masyarakat dan lingkungan hidupnya melalui analisis yang cermat atas akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam serta implikasinya bagi kesehatan lingkungan dan keberlanjutan hidup, serta mempelajari saling-ketergantungan (*interdependence*) antara unit politik dan saling keterkaitan (*inter-relationship*) antar unit politik dengan lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Pada dasarnya pemikiran *Green Politics* adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Berdasarkan adanya Politik Hijau tersebut, dilema yang dialami Jepang adalah bagaimana Jepang bisa berkomitmen penuh pada Protokol Kyoto jika Jepang masih fokus pada pembangunan negara yang tentunya Jepang harus bisa menangani permasalahan akibat dampak dari pembangunan di dalam negeri.

3. **Kendala Biaya Penanganan Dampak Perubahan Iklim Jepang**, biaya penanganan masalah dampak perubahan iklim bagi Jepang tidaklah sedikit mengingat begitu banyaknya perusahaan-perusahaan industri Jepang di dalam maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan oleh sebuah research yang menyatakan bahwa target penurunan emisi GRK hingga 6 % menjadi sebuah beban berat yang mempengaruhi kebijakan Jepang, dikarenakan berkomitmen dalam masalah lingkungan akan mengorbankan sebagian kepentingan ekonomi jangka panjang, sebab untuk melaksanakan target penurunan emisi secara otomatis memerlukan

program pembaharuan sumber tenaga, program penurunan karbon dioksida terhadap industri serta penggantian bahan bakar.

4. **Kegagalan Jepang pada Protokol Kyoto Komitmen I**, Kegagalan Jepang dalam mencapai target penurunan emisi pada Protokol Kyoto Komitmen I inilah yang membuat Jepang dilema dan juga menurunkan kepercayaan diri Jepang dalam berkomitmen kembali pada Protokol Kyoto Komitmen II. Selain karena alasan ketidakikutsertaan Amerika dalam berkomitmen pada Protokol Kyoto dan ketidakadilan yang dirasakan Jepang terhadap China dalam pengurangan emisi, Jepang pun mengoreksi diri dalam menetapkan target pengurangan emisinya. Evaluasi Jepang terhadap pencapaian target emisi tersebut dikenal dengan Kebijakan Iklim Mamizu (*Mamizu Climate Policies*).

Lingkungan dan politik di Jepang memiliki ketergantungan yang cukup besar khususnya didalam membuat sebuah kebijakan yang ramah lingkungan. Hal tersebut berdasarkan kepentingan pemerintahan Jepang terhadap masalah ekonomi. Didalam pemerintahan Jepang terdapat perdebatan mengenai peningkatan industrialisasi yang berdampak terhadap emisi GRK yang menyebar di atmosfer yang akan berdampak terhadap lingkungan atau fokus terhadap lingkungan yang belum tentu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jepang. Jepang mengalami dilema yang cukup besar saat ini. Dalam pendekatan ekologi politik, tidak berkomitmennya Jepang dalam Protokol kyoto ini karena faktor politik dan ekonomi. Pada akhirnya Jepang yang merupakan salah satu negara industri penghasil emisi gas buang terbesar bersama 16 negara maju lainnya,

menolak memperpanjang komitmennya seperti tertuang dalam Protokol Kyoto pada komitmen kedua. Meskipun demikian, Jepang terus melakukan upaya perbaikan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan pengembangan teknologi inovatif rendah karbon, meningkatkan kerja sama internasional, selain itu juga pada bidang industri diadakan efisiensi distribusi agar hemat energi dan menekan angka emisi.